

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai sistem pemerintahan Indonesia yang berdasar pada hukum yang berlaku. Segala sesuatu didasarkan pada hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu prinsip penting dari Negara hukum merupakan adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut di kemukakan dalam Pasal 24 Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Lembaga peradilan merupakan tempat mencari keadilan bagi setiap warga negara dan sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari hendaknya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau melalui jalur hukum mengingat Indonesia merupakan Negara hukum sehingga dapat menghindari retaknya hubungan sosial yang telah terbina dengan baik.

Berdasarkan statistik Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2010, jumlah perkara terbanyak yang mendominasi perkara perdata adalah yang

berkaitan dengan sengketa tanah yaitu 1824 perkara atau sekitar 44,26% dari jumlah perkara perdata yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Perkara tersebut diikuti dengan perbuatan melawan hukum (PMH) sebanyak 836 perkara atau sekitar 20,17.¹

Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sering menimbulkan sengketa. Sengketa yang terjadi dalam acara perdata diantaranya yaitu sengketa mengenai tanah, diantaranya yaitu sengketa dalam hal jual beli. Permasalahan dalam jual beli tanah dan/atau bangunan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang timbul antara penjual dan pembeli diantaranya yaitu penjual bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijual atau pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah, atau tanah yang diperjualbelikan dalam sengketa atau merupakan tanah yang tidak diijinkan untuk diperjualbelikan.²

Sengketa tanah merupakan sengketa yang timbul karena konflik kepentingan atas tanah. Kasus sengketa jual beli tanah yang merupakan salah satu kasus dalam pertanahan di Indonesia. Pada tahun 2017 berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jumlah kasus pertanahan di Indonesia yaitu 4223 kasus, yang telah diselesaikan sebanyak 2014 dan sisa 2209 kasus.³

¹ Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya. 2014. *Disparatis Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil (Kajian Terhadap Lima Putusan Pengadilan Negeri dan Lima Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2004-2011 di Yogyakarta*. Yogyakarta. Jurnal Yudisial. Vol. 7 No.2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hal. 174.

² Herlina Ratna SN. 2015. *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli*. Lampung. Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Progresif. Vol.6 No.2. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung. Hal. 97.

³ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id>, diakses tanggal 22 Februari 2017.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi didalam pengadilan, kemudian berkembang penyelesaian sengketa melalui kerjasama (*kooperatif*) diluar pengadilan atau biasa disebut dengan Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS). Penggunaan pranata Pilihan penyelesaian sengketa (PPS) diluar pengadilan yaitu dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian hakim.⁴ Penyelesaian sengketa tanah pada umumnya ditempuh melalui jalur hukum di pengadilan.⁵

Sengketa tanah dalam hukum acara perdata dapat berupa gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum. Contoh gugatan Wanprestasi adalah putusan nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Sidoarjo dan Putusan Nomor 497/Pdt.G/2012/PN.Sby, sedangkan putusan mengenai Perbuatan Melawan Hukum adalah putusan Nomor 91/ Pdt.G/2009/ PN.Ska.

Kasus wanprestasi jual beli tanah dan/atau bangunan terjadi pada putusan Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Sidoarjo terjadi antara X sebagai Penggugat / Penjual dan W sebagai Tergugat I, Y sebagai Tergugat II, serta Z sebagai Tergugat III yang merupakan pembeli, para pihak tersebut melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dengan luas 2479 m² yang terletak di Jalan Abdul Rahman RT 001 RE 01 Pabean, Sedati, Sidoarjo (obyek perkara). Karena adanya beberapa surat untuk pelaksanaan perjanjian jual beli dihadapan PPAT belum terpenuhi maka dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah di bawah tangan dan di waarmeding oleh Notaris

⁴ Sarah D. L Roeroe. 2013. *Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan*. Manado. Jurnal Penegakan Hukum. Vol. I No. 6. Universitas Sam Ratulangi Manado.

⁵ Maria S.W dan Sumardjono Nurhasana Ismail. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta. Gramedia. Hal. 5.

pada tanggal 17 November 2011. Bahwa harga yang disepakati adalah sebesar Rp 1.239.500.000,- dan Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali dengan total penerimaan pembayaran yang diterima Pengugat adalah Rp 145.000.0000,-. Pada masa tenggang waktu yang dijanjikan telah lewat, Tergugat I, II, dan III telah cidera janji (wanprestasi) dengan tidak segera melakukan transaksi jual beli. Setelah waktu yang disepakati habis, ternyata Tergugat I, II, dan III tidak bersedia melakukan transaksi jual beli. Sehingga hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, dan III melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pembayaran jual beli tanah dan/ bangunan.

Selain kasus diatas, kasus wanprestasi pada putusan nomor 497/Pdt.G/2012/PN.Sby terjadi antara X Pihak Pembeli yaitu sebagai Penggugat dan Y yaitu pihak penjual sebagai Tergugat, para pihak sepakat membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yasan, Letter C Nomor 5049 persil : 35.d II, seluas kurang lebih 90 m² yang terletak di Jalan Medayu Utara XXXC Blok B, 38A Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya, yang dihadapan Notaris. Bahwa terhadap obyek sengketa disepakati harga Rp 110.000.000,- dengan pembayaran pertama sebesar Rp 40.000.000,-, pembayaran kedua Rp 40.0000.000,-, dan sisanya akan dibayar secara berangsur dengan 8 kali angsuran. Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp 109.762.000,- sehingga sisa pembayaran sebesar Rp 238.000,-. Pada saat pembeli akan melunasi sisa pembayaran dengan maksud untuk dapat dilakukan jual beli, pihak penjual tanpa alasan

yang jelas tidak mau menerima pelunasan pembayaran. Atas perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji). Sehingga hakim menjatuhkan putusan putusan verstek dengan tidak hadirnya Tergugat selama persidangan dengan amar putusan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum atas jual beli tanah dan/atau bangunan dalam putusan Nomor 91/Pdt.G/2009/PN.Ska terjadi antara W sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap X, Y, Z sebagai Tergugat I, II dan III atas penempatan tanah tanpa hak yang sah, dimana seseorang menempati, menggunakan dan menikmati dari hasil tanah yang dikuasai oleh orang lain dengan perbuatan melawan hukum. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menempati, tanah dan bangunan tanpa adanya proses jual beli atau sewa menyewa. Dalam jawaban gugatan penggugat, Tergugat I, II, dan III membantah bahwa perolehan hak milik atas tanah yang diperoleh Penggugat adalah tidak sah atau cacat hukum. Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bangunan obyek sengketa sah milik penggugat. Tergugat I, II, dan III dalam hal ini mengajukan gugatan pada tingkat banding.

Dengan adanya berbagai kasus yang muncul di Pengadilan, menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang menimbulkan sengketa tanah. Sehingga, dalam suatu sengketa yang diajukan ke Pengadilan sebagai tempat terakhir mencari keadilan hendaknya dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Hukum acara perdata mengenal adanya pembuktian. Pembuktian merupakan proses dimana para pihak memberi keyakinan atas peristiwa hukum. Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW mengenal lima macam alat bukti yaitu Bukti Surat/Tulisan, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR, 311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan dua macam pengakuan, yaitu pengakuan yang di depan sidang (dimuka hakim) dan pengakuan yang dilakukan diluar persidangan. Pengakuan sebagai salah satu alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR dapat digunakan sebagai salah satu hal bagi hakim dalam mengakhiri suatu perkara, namun bentuk pengakuan tersebut merupakan pengakuan dengan syarat yang telah ditentukan.

Pengakuan yang dikemukakan untuk sebagian dalam teori dan praktik disebut sebagai pernyataan campuran atau *mixed statement*, yang berarti mengakui satu atau beberapa elemen tertentu dalam sengketa (gugatan) atau selebihnya. Menurut hukum pembuktian, pengakuan merupakan lawan dari perlawanan atau bantahan yang menunjukkan pihak tergugat menyangkal apa yang didalilkan penggugat atau penggugat membantah yang yang dikemukakan tergugat. Sehingga akan membawa suasana proses

pemeriksaan kearah pembebanan wajib bukti untuk membuktikan dalil yang dibantah masing-masing.⁶

Putusan hakim dalam memutuskan suatu putusan dalam pertimbangannya harus berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Contoh Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2013 tentang perkara Cerai Talak, hakim memutuskan berdasarkan Pasal 174 HIR yang merupakan pengakuan murni. Namun dalam pertimbangan hukum hakim, tidaklah tepat diterapkannya Pasal 174 HIR karena seharusnya yang diterapkan adalah Pasal 176 HIR yang merupakan pengakuan berkualifikasi.⁷

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan hal yang digunakan hakim dalam mempertimbangan suatu putusan. Hakim dalam menetapkan putusan harus memperhatikan bahwa dalam putusan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “. . . putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”⁸

Asas tersebut dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Alasan-alasan atau argumentasi itu adalah

⁶ Geovan Ngatung. 2016. *Pembuktian Dalam Proses Persidangan Menurut HIR dan Rbg*. Manado. Jurnal Lex Privatum. Vol. IV No. 1. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

⁷ Ain Mukhlisatun Awalia. 2014. *Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0758/Pdt.G/2013 tentang perkara Cerai Talak*. Surabaya. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hal. 65-66.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Putusan merupakan hasil dari proses persidangan di Pengadilan. Kualitas putusan hakim dapat dinilai dari alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Oleh Karena itu, putusan yang berkualitas harus berpegang teguh pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Peneliti tertarik mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg dalam pemenuhan asas kepastian dan keadilan serta pertimbangan hakim dalam memutus suatu sengketa yang diajukan di Pengadilan .

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik mengangkat judul **“ANALISIS BUKTI PENGAKUAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan bukti pengakuan dalam pertimbangan hakim sebagai dasar menjatuhkan putusan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg ditinjau dari asas kepastian hukum dan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu hukum yaitu dalam mendiskripsikan dan menganalisis mengenai penilaian hakim berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg ditinjau dari kepastian dan keadilan hukum serta menganalisis mengenai penerapan bukti pengakuan dalam pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penerapan bukti pengakuan dalam pertimbangan hakim sebagai dasar menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg ditinjau dari kepastian hukum dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang

studi kasus yang diteliti oleh penulis, serta sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang Ilmu Hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim agar dapat menjalankan tanggung jawab secara maksimal. Serta memberikan pertimbangan mengenai penerapan alat bukti Pengakuan murni/bulat sebagaimana diatur Pasal 174 HIR dan Pengakuan berklausul sebagaimana diatur Pasal 176 HIR pada putusan Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg terkait kepastian dan keadilan.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terutama pada alat bukti Pengakuan dalam hukum acara perdata.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi hakim, akademisi dan masyarakat umum mengenai pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan terutama pada alat bukti Pengakuan dalam hukum acara perdata.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normatif.⁹

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok pada pendekatan ini adalah *ratio decidendi*

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media. Hal. 55-56.

¹⁰ Ibid. hal, 35.

atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan alasan-alasan hakim untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.¹¹

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif maka istilah yang digunakan bukanlah “data” melainkan “bahan hukum”, adapun jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif/peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
7. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg tertanggal 25 April 2016.

¹¹ Ibid. hal, 94.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum sekunder tersebut diantaranya :

1. Buku-buku ilmiah yang terkait;
2. Hasil penelitian yang terkait;
3. Makalah-Makalah Seminar yang terkait;
4. Jurnal-jurnal dan literature yang terkait;
5. Doktrin atau pendapat ahli;

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, berupa teori-teori, definisi, permasalahan, pembahasan, serta pengaturan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, sistem pembuktian perkara perdata, dan kekuatan pembuktian alat bukti dalam sidang perkara perdata.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.¹²

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena

¹² Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. Hal. 46.

itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan/studi dokumen.

Studi dokumen adalah alat pengumpulan bahan hukum tertulis dengan *content analysis*.¹³ Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penerapan alat bukti Pengakuan dalam acara perdata.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisa yang digunakan adalah Analisa kesesuaian/Analisa keselarasan. Dimana penelitian ini menggunakan Teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal dengan bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan lebih khusus.

Dalam penelitian ini, setelah bahan terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam Teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”.

Content Analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan,

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* Hal. 22.

mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.¹⁴

Selanjutnya adalah melakukan analisis terkait obyek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg terkait pemenuhan unsur kepastian dan keadilan. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap obyek penelitian terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Dalam penelitian normatif, pengolahan data merupakan kegiatan mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi merupakan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi.

Menggunakan teori sebagai panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Kemudian penggunaan teori ini dengan menggunakan logika deduktif.

Penelitian preskriptif yaitu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁵ Sehingga sifat analisis prespetif dimaksudkan untuk

¹⁴ Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 203.

¹⁵ Soerjono Soekamto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. Hal. 10.

memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang dilakukannya mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁶

G. Rencana Sistematika Penelitian

Peneliti menyusun sistematika untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, oleh karena itu peneliti menyusun sistematika agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan judul yang penulis ajukan, akan dijelaskan mengenai teori-teori hukum bahan analisis dari permasalahan yang dibahas oleh penulis terkait penerapan alat bukti Pengakuan pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg dalam acara perdata dan meninjau dari aspek kepastian hukum dan keadilan.

¹⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai penerapan alat bukti Pengakuan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mlg dan meninjau dari mengenai aspek kepastian hukum dan keadilan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN